

Nama : M. Dimas Syaputra
NPM : 2213031012
Kelas : A
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S. Pd., M.Pd.
Drs. Nurdin, M.Si.
Meyta Pritandari., S.Pd., M.Pd.

STUDY CASE

1. Analisis Struktur Pasar Ketiga Sektor

Struktur pasar di Indonesia bervariasi secara signifikan antar sektor. Petani cabai di Jawa Barat beroperasi dalam kondisi yang mendekati Pasar Persaingan Sempurna, ditandai dengan banyak penjual dan produk homogen, yang menghasilkan harga efisien tetapi membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga. Sebaliknya, PT PLN (Persero) adalah contoh klasik Monopoli Murni yang menguasai penyediaan listrik nasional, memungkinkan efisiensi skala besar untuk infrastruktur, namun berisiko menimbulkan inefisiensi alokasi dan kurangnya inovasi karena minimnya tekanan kompetitif. Sementara itu, sektor transportasi *online* yang didominasi oleh Gojek dan Grab mencerminkan Pasar Oligopoli, di mana persaingan sengit berfokus pada inovasi dan fitur layanan, memberikan keuntungan berupa diferensiasi produk bagi konsumen, meskipun terdapat risiko kolusi atau penetapan harga yang tidak adil.

2. Kelebihan dan Kelemahan Ketiga Sektor

Pasar Persaingan Sempurna pada sektor petani cabai adalah yang paling efisien secara alokatif, memastikan konsumen mendapat harga serendah mungkin, namun inefisien secara produktif karena petani rentan terhadap ketidakstabilan harga, mengancam keberlanjutan pasokan pangan. Sebaliknya, Monopoli Murni pada PLN, meskipun penting untuk mencapai efisiensi skala besar dalam pembangunan infrastruktur, secara inheren inefisien dalam alokasi sumber daya dan menekan inovasi, karena perusahaan tidak memiliki tekanan kompetitif dan berpotensi membebankan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal kepada konsumen. Sementara itu, Pasar Oligopoli pada sektor transportasi *online* (Gojek dan Grab) mendorong inovasi yang intensif dan diferensiasi layanan yang sangat menguntungkan konsumen, namun persaingan non-harga yang mahal dan risiko

kolusi atau *predatory pricing* dapat menciptakan inefisiensi biaya sosial dan menghambat pemain baru masuk, yang pada akhirnya dapat merugikan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus fokus pada intervensi yang mempertahankan efisiensi (terutama pada monopoli alamiah) sambil menekan *market power* yang berlebihan demi keadilan dan inovasi di seluruh sektor.

3. Kebijakan yang Dapat di Ambil Pemerintah

Kebijakan harus menargetkan perbaikan efisiensi dan keadilan pasar. Untuk mengatasi ketimpangan dalam sektor Monopoli (PLN), kebijakan yang disarankan adalah penguatan regulasi independen dan pemisahan fungsi (*unbundling*) untuk memisahkan fungsi pembangkitan (yang dapat dikompetisikan) dari fungsi transmisi dan distribusi (monopoli alami), berdasarkan teori bahwa persaingan harus didorong pada segmen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga. Untuk sektor Oligopoli (Gojek dan Grab), rekomendasi fokus pada regulasi anti-*predatory pricing* (melarang diskon berlebihan yang merusak pesaing) dan peningkatan transparansi skema kemitraan, didasarkan pada teori bahwa intervensi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan *market power* yang dapat merugikan konsumen dan mitra pengemudi.

4. Potensi Perubahan bagi Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang saat ini bersandar pada Persaingan Sempurna sangat mungkin bergeser menuju struktur Oligopoli di masa depan. Proses ini terutama akan terjadi melalui konsolidasi vertikal di mana perusahaan *off-taker* (pengolah/distributor ritel besar) mulai mendominasi dan mengikat petani melalui kontrak eksklusif, serta konsolidasi horizontal di tingkat petani (pembentukan koperasi raksasa) atau melalui dominasi paten benih oleh segelintir perusahaan. Pergeseran ini, meskipun dapat meningkatkan efisiensi dan standarisasi produk karena skala ekonomi, berpotensi serius mengancam kesejahteraan petani karena melemahnya daya tawar mereka, dan dapat menimbulkan risiko besar terhadap ketahanan pangan jika beberapa pemain utama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengawasan yang ketat untuk menjaga persaingan dan keadilan di seluruh rantai nilai pertanian.